



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KASUS SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Hari / Tanggal | : Rabu, 10 Maret 2011 | |
| Pimpinan Tim | : dr. Ribka Tjiptaning | |
| Anggota | : 1. Dhiana Anwar, SH | (F.PD) |
| | 2. Dra. Hj. Hernanai Hurustiati | (F.PG) |
| | 3. Ir. Arif Minardi | (F.PKS) |
| | 4. Ir. A. Riski Sadig | (F.PAN) |
| | 5. Chusnunia | (F.PKB) |
| | 7. Putih Sari, SKG | (F.P.Gerindara) |
| | 8. H.A. Ferdinand Sampurna Jaya | (F.P.Hanuara) |
| Kementerian Nakertrans RI | : 1. Roostiawati, SH, M.Sc | |
| | 2. Ir. Hadi Saputra | |
| | 3. Oscar Abdulrahman, S.Sos | |
| | 4. Drs. Tukiman, SH, MM, MH | |
| | 5. Brasti Rahayu | |
| | 6. Suryanti | |
| BNP2TKI | : Ir. Agusdin Subiyantoro, M.Si | |

I. PENDAHULUAN

Kunjungan Komisi IX DPR-RI ke Kabupaten Lombok Barat merupakan kunjungan lapangan kasus spesifik dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai hasil Rapat Komisi IX DPR RI pada tanggal, 23 Pebruari 2011. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Lombok Barat, yang berdampak kepada kehidupan keluarga dan sosial TKI.

Kunjungan lapangan kasus spesifik tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal, 09 S.D. 11 Maret 2011. Tim kunjungan beranggotakan 8 (delapan) orang Anggota Komisi IX DPR-RI dengan didampingi oleh 6 (enam) orang pejabat/pegawai dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 1 (satu) orang pejabat dari BNP2TKI.

Tim telah melakukan pertemuan di Kantor Bupati Lombok Barat yang dihadiri berbagai pihak, antara lain Bupati Lombok Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, selain itu melakukan tinjauan lapangan dan berdialog dengan Kepala Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Kepala Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dan Kepala Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan memiliki luas wilayah 1.053,9 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 611.704 orang. Kontribusi sektor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat tahun 2009 adalah berasal dari pertanian (27,51%) serta perdagangan, hotel dan restoran (21,83%). Perkembangan wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat semakin meningkat sejak tahun 2004 sampai saat ini dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sebesar Rp.18.801.421.739,85 atau sekitar 33% dari jumlah keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebanyak 61,14% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,12%. Realisasi Penempatan TKI tahun 2010 ke Arab Saudi sebanyak 723 orang perempuan untuk sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), dan ke Malaysia sebanyak 5.105 orang laki-laki untuk sektor pertanian. Sampai dengan Februari 2011 tidak ada pengiriman ke Arab Saudi sedangkan ke Malaysia dikirim sebanyak 970 orang laki-laki dan 5 orang perempuan untuk sektor pertanian. Pengaduan kasus TKI Asia Pasifik dan Timur Tengah yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 berjumlah 47 kasus dengan 23 kasus selesai dan 24 kasus dalam proses.

a. Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Terdapat sekitar 800 – 1000 orang yang menjadi TKI, dengan ratio jenis kelamin sekitar 50 : 50, perempuan diberangkatkan ke Malaysia dan laki-laki diberangkatkan ke Arab Saudi. Terdapat beberapa istri dari TKI laki-laki yang ditinggal cukup lama dan tidak diberikan penghidupan yang layak oleh suami, sehingga mereka bekerja mencari sumber pendapatan sendiri dengan menjadi buruh sawah/ladang dan pedagang.

b. Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Terdapat kampung yang sebagian besar warganya menjadi TKI dan cukup berhasil. Beberapa Kepala Dusun bahkan menjadi Petugas Lapangan (PL) untuk mendapatkan warga agar mau menjadi TKI. Sebagian besar warganya berpola pikir menjadi TKI itu merupakan suatu kebanggaan dan berterimakasih kepada negara-negara tujuan yang telah memberikan mereka penghidupan yang layak.

c. Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Di desa Bagek Polak terdapat beberapa warganya menjadi TKI di Malaysia maupun di Arab Saudi akan tetapi pendataan warga yang menjadi TKI tidak akurat. Kepala Desa tidak berperan aktif untuk melakukan pendataan TKI. Terdapat 1 (satu) kasus pemerkosaan TKI di Arab Saudi, akan tetapi proses hukum dan perlindungannya tersendat karena beberapa prosedur yang tidak dilakukan oleh TKI.

II. POKOK- POKOK PEMASALAHAN

Dalam pertemuan dengan berbagai pihak, dibicarakan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih banyaknya tenaga kerja lokal yang belum mempunyai kompetensi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal sehingga untuk mempersiapkan SDM tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat membangun 11 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan merintis pembangunan Politeknik Jati Emas: bidang Kelistrikan, Otomotif, Pertanian, Pariwisata, Pelayaran dan Perikanan, Pertambangan, dan Komputer Jaringan.
2. Masih banyaknya permasalahan pendataan TKI yang tidak akurat sehingga dihimbau agar pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat segera memperbaikinya. Adanya permasalahan bahwa keinginan warga untuk dapat bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia, karena mereka mempunyai harapan selain menjadi TKI agar dapat juga melakukan Ibadah Haji atau Umroh.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan penandatanganan MoU dengan PT. Sendang Damar Sedayu Agung untuk persiapan pengiriman TKI ke Amerika dan Kanada.
4. Terjadi pengalihan sepihak ke Lombok Timur oleh Gubernur Provinsi Lombok sehingga pemerintah daerah mengusahakan untuk merintis pembangunan BLK Internasional
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Pancakarsa untuk memfasilitasi penyelesaian kasus TKI di Malaysia dan pemulangan TKI yang bermasalah
6. Pembentukan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) Kabupaten Lombok Barat sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang telah ditindaklanjuti dengan SK Bupati.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor. 36 Tahun 2010 serta moratorium yang telah dikeluarkan.

III. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN KE DESA GELOGOR, DESA KEBON AYU DAN DESA BAGEK POLAK

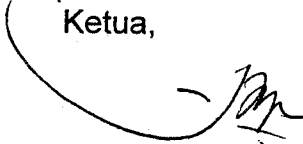
- a. Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa istri dari TKI laki-laki yang ditinggal cukup lama dan tidak diberikan penghidupan yang layak oleh suami, sehingga mereka bekerja mencari sumber pendapatan sendiri dengan menjadi buruh sawah/ladang dan pedagang. Diperlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah agar para istri yang ditinggal oleh suami dan tidak diberikan penghidupan yang layak secara finansial dapat bertahan hidup melalui pemberdayaan masyarakat. Bahkan ada istri seorang TKI yang sudah ditinggalkan oleh suami selama 4 tahun dan setiap tahun hanya diberi uang untuk biaya hidup dengan seorang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat sebagian besar warganya berpola pikir menjadi TKI itu merupakan suatu kebanggaan dan berterimakasih kepada negara-negara tujuan yang telah memberikan mereka penghidupan yang layak. Diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk

- mengubah pola pikir tersebut dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di lokal sehingga kesejahteraan warga dapat terpenuhi di daerah sendiri.
- c. Di desa Bagek Polak terdapat beberapa warganya menjadi TKI di Malaysia maupun di Arab Saudi akan tetapi pendataan warga yang menjadi TKI tidak akurat. Diperlukan pengawasan dan pembenahan pendataan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

IV. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR-RI akan merekomendasikan kepada Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam penanganan permasalahan TKI di Kabupaten Lombok Barat yang belum terselesaikan.
2. Komisi IX DPR-RI meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai ke perangkat desanya agar membenahi sistem pendataan bagi calon TKI, TKI dan TKI yang pulang ke Indonesia.
3. Komisi IX DPR-RI mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan kepada warganya yang menjadi TKI.
4. Komisi IX DPR-RI mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Jakarta, 14 Maret 2011
Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI
Ketua,


dr. RIBKA TJIPTANING
A-342